

SKRIPSI

**MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN
HUTAN RAKYAT DI DESA CENRANA BARU
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh:
FAISAL SUDRAJAT
M01171562



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di
Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten
Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Faisal Sudrajat
NIM : M011171562

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si.
NIP. 19671005199103 1 006

Pembimbing II

Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP., IPM
NIP. 19900721 201801 5 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama . : Faisal Sudrajat
NIM : M011 17 1562
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Cenrana Baru
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 17 Februari 2022

Yang menyatakan



Faisal Sudrajat

ABSTRAK

Faisal Sudrajat (M011171562) Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Muhammad Dassir dan Adrayanti Sabar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran modal sosial dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Modal sosial memiliki tiga unsur penting yaitu norma, kepercayaan dan jaringan sosial yang mendorong terbentuknya suatu hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini dilakukan dengan melalui proses teknik observasi dengan pendekatan partisipatif dan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya peran modal sosial dalam aktivitas pengelolaan hutan rakyat. Sehingga mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Modal Sosial, Pengelolaan, Hutan Rakyat

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan**” guna memenuhi syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Limpahan kasih sayang, rasa hormat, serta doa yang tulus penulis persembahkan kepada orang tua Ayah dan Ibu tercinta, **Tatang Ruswandy, S.Sos.**, dan **Alm. Sitti Aminah Tangke**, kedua saudaraku tercinta **Agus Hendra Prasetya dan Dewi Paramitha, S.Hut.**, orang terdekatku **Iranda, S.Si** serta semua rekan-rekan yang tanpa henti memberikan penulis motivasi, doa dan kasih sayang serta semangat dalam menyelesaikan skripsi begitu juga saat perjuangan menuntut ilmu. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh semua orang di lingkungan penulis, baik bantuan berupa materil maupun bantuan spiritual. Karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si.** dan Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut.,MP., IPM**, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Bapak **Dr.Ir.Beta Putranto,M.Sc.** dan Ibu **Andi Vika Faradiba Muin,S.Hut.,M.Hut** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan serta saran yang sangat konstruktif yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halimah Larekeng, SP., MP**, dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuan yang telah diberikan.

4. **Pak Lukman, Pak Tare dan Pak Ating**, serta semua masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah terlibat memberikan bantuan selama penulis berada di lokasi penelitian. Terima kasih atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama penulis berada di lokasi penelitian hingga melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhususnya angkatan 2017 dan Tim Penelitian Cenrana Baru A. Mammah Nabira Hadiningrat, S.Hut dan Wilda Damayanti. yang banyak membantu dalam pemberian dukungan selama penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan **Born To Survive** dan **Fraxinus 17** yang senantiasa memberikan penulis dukungan dan motivasi.
7. Teman-teman seperjuanganku Muhammad Fachri Irsad, Muh Saifullah Rafrin, Armawan Budiman, Sri Eka, A. Annisa, S.Hut., Andi Wahyu Bakri, S.Hut., Andi Idham Ainun Khalik, S.Hut., Ricky Priandi Purnama, S.Hut., Andi Maulidin, Ardiana, Nur Fadillah Sunardi, S.Hut, Nur Fadillah Sunardi, S.Hut, Juarni, Fanny Fadillah, S.Hut, Feby Natasha, S.Hut., Egha Cyntia W, S.Hut., Arya Perdana, Asrafi Najmi Zainuddin serta teman-teman **MKU D** terimakasih atas bantuan berupa dukungan semangat selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi yang harus diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca demi penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada diri penulis sendiri.

Makassar, Februari 2022

Faisal Sudrajat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Modal Sosial.....	4
2.1.1 Dimensi dan Karakteristik Modal Sosial	6
2.1.2 Unsur Pembentuk Modal Sosial.....	7
2.1.3 Wujud Nyata Modal Sosial	9
2.1.4 Peran dan Fungsi Modal.....	11
2.2. Hutan Rakyat.....	11
2.3 Pengelolaan Hutan Rakyat	12
2.3.1 Aspek Sosial.....	12
2.3.2 Aspek Ekonomi.....	13
2.3.3 Aspek Ekologi.....	13
2.4 Aktifitas Pengelolaan Hutan Rakyat	14
III. METODE PENELITIAN	15
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2. Alat dan bahan Penelitian.....	15
3.3. Populasi Sampel Penelitian	15
3.4. Jenis Data dan Sumber Data	15
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	16

3.6. Analisis Data.....	17
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	19
4.1.1. Letak dan Luas Wilayah.....	19
4.1.2. Topografi.....	20
4.1.3. Iklim dan Tanah.....	20
4.2 Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya	20
4.2.1. Penduduk Mata Pencaharian	20
4.2.2. Agama dan Adat Istiadat	21
4.2.3. Sarana dan Prasarana.....	21
4.3. Pengelolaan Hutan Rakyat	23
4.3.1. Persiapan Lahan	23
4.3.2. Penanaman.....	26
4.3.3. Pemeliharaan	27
4.3.4. Pemanenan.....	28
4.4. Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat	30
4.3.1. Norma Sosial	31
4.3.2 Kepercayaan	33
4.3.3. Jaringan Sosial.....	35
4.5. Permasalahan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat	37
V. PENUTUP	39
5.1. Kesimpulan	39
5.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Indikator Modal Sosial.....	21
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Cenrana.....	26
Tabel 3.	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cenrana Baru.....	26
Tabel 4.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Cenrana.....	27
Tabel 5.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Cenrana.....	28
Tabel 6.	Persiapan Lahan.....	31
Tabel 7.	Penanaman.....	32
Tabel 8.	Pemeliharaan.....	33
Tabel 9.	Pemanenan	34
Tabel 10.	Pembagian Hasil Panen Pemilik Lahan dengan Buruh Tani.....	35
Tabel 11.	Norma Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat.....	38
Tabel 12.	Kepercayaan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat.....	39
Tabel 13.	Jaringan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Rakyat.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Desa Cenrana Baru.....	24
Gambar 2.	Tahapan Pengelolaan Hutan Rakyat.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner Wawancara.....	49
Lampiran 2.	Responden Hasil Wawancara.....	53
Lampiran 3.	Penilaian Kepercayaan Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat Berdasarkan Hasil Wawancara.....	54
Lampiran 4.	Dokumentasi Penelitian.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah terkait tekanan sumber daya hutan dapat diselesaikan salah satunya melalui kegiatan pembangunan hutan masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan menurunnya luas kawasan hutan, akibatnya para penduduk mulai merambah ke bagian hutan untuk memenuhi kebutuhan. (Alviya dkk., 2017). Pembangunan hutan rakyat Terdiri atas sistem *agrforestry* dan pola tanaman monokultur. Hutan rakyat memegang fungsi penting sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena biasanya hutan rakyat ditanami tumbuhan berkayu dan tumbuhan pangan, sehingga hutan rakyat juga berfungsi sebagai rehabilitas lahan dan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat (Handoko dkk., 2012).

Menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan hutan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh hampir negara di seluruh dunia. Melihat kondisi hutan yang semakin lama mengalami kerusakan dan belum mendapatkan solusi rehabilitasi karena permasalahan global, maka kegiatan swadaya dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk pelestarian kawasan hutan. Kerjasama yang dilakukan masyarakat berdasarkan pada norma dan nilai jaringan sosial dan telah disepakati bersama merupakan pemaknaan dari modal sosial (Rijal dan Syaifullah, 2013).

Menurut Putnam (1993), Modal sosial diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara tingginya tingkat modal sosial dengan efektifitas dari pihak pemerintah. Tingginya modal sosial akan menyebabkan partisipasi masyarakat yang tinggi pula dikarenakan adanya akuntabilitas yang kuat berasal dari

pemerintah. Oleh karena itu, modal sosial termasuk ke dalam sebuah institusi sosial yang di dalamnya melibatkan penerapan norma, kepercayaan, serta jaringan sosial mendorong terbentuknya hubungan timbal balik atau kolaborasi sosial yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Daud dan Fatmawati, 2019).

Dalam kegiatan pengelolaan hutan pentingnya sumber daya guna mendorong individu untuk bekerja mencapai tujuannya dengan menggunakan modal sosial yang dimiliki. Pengelolaan mengedepankan tujuan kolektif antara pemerintah dan masyarakat saat ini maupun masa mendatang dalam menjaga kelestarian hutan (Nindya dkk., 2020).

Beberapa penelitian yang terkait tentang modal sosial pada pengelolaan hutan beberapa kali dilakukan, diantaranya oleh Muspida (2007) yang melakukan kajian di Kecamatan Camba Kabupaten Maros menunjukkan bahwa adanya keterkaitan hubungan yang terjadi antara modal sosial mikro dengan modal sosial makro yang saling memberikan kepercayaan dan membentuk sebuah jaringan sosial terlihat dari adanya hutan kemiri di Kabupaten Maros yang bersama-sama menghasilkan kerjasama yang terkoordinir membangun hutan kemiri.

Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana agar hutan Rakyat ini tetap berkelanjutan, oleh karena itulah dibutuhkan perencanaan matang yang berbasis kepada situasi dan kondisi terkini. Sehingga penelitian tentang upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk perencanaan pengelolaan hutan rakyat merupakan fungsi dari modal sosial. Dalam hal ini, Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian dilakukan karena merupakan salah satu sentral pengelolaan hutan di Sulawesi Selatan. Aksesibilitas dan kemudahan memperoleh data

penelitian menjadikan pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi sebagai tempat penelitian.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan mengkaji peran modal sosial di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan hutan rakyat.

Kedepannya, diharapkan hasil dari penelitian mampu menjadi sumber informasi seberapa pentingnya peran dari modal sosial pengelolaan Hutan Rakyat yang terdapat di Desa Cenrana Baru sesudah program hutan rakyat ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial

Penerimaan konsep modal sosial cukup diterima kalangan profesional, namun tetap saja konsep yang diberikan masih sukar untuk dapat dipahami. Banyaknya pengalaman yang memperlihatkan inisiatif pembangunan tidak mempertimbangkan nilai norma, budaya, motivasi dan solidaritas akan mendorong adanya masalah yang sama terkait konsep tersebut. Menurut Nengsih (2016) jika seseorang berhasil memahami dari konsep modal sosial maka tentu saja dapat melakukan investasi guna menciptakan manfaat yang besar. Modal sosial merujuk kepada norma yang ada pada masyarakat dan dapat dipercayai serta dijalankan pada kehidupan sehari-hari dalam mempengaruhi kualitas dan keberlangsungan hidup (Cahyono, 2012).

Konsep mengenai modal sosial telah banyak berkembang di kalangan pakar ilmu, namun umumnya didasarkan pada pandangan Coleman dan Putnam sebagai orang yang pertama kali berhasil merumuskan konsep dari modal sosial (1999), Coleman dan Putnam menjelaskan jika modal sosial merupakan keragaman entitas yang memiliki dua karakter umum yang ke semua aspek struktur sosial dan dapat memfasilitasi hubungan antar individu-individunya". Modal sosial bukan hanya sebuah entitas tunggal melainkan terdiri atas struktur yang memfasilitasi tindakan antara individu. Sementara Coleman (1999) menjelaskan jika ia memandang sebuah modal sosial melalui kaca mata struktur sosial yang mempunyai aturan serta dimanfaatkan bersama-sama.

Putnam (1993) menyebutkan suatu modal sosial dapat memaparkan

mengenai organisasi sosial beserta jejaring sosial yang saling menguntungkan, norma dan kepercayaan. Jaringan serta norma yang dimiliki modal sosial yang memiliki nilai kepercayaan antar masyarakat dan masyarakat dengan pemimpin memiliki keterkaitan secara empirik.

Modal sosial termasuk ke dalam institusi sosial yang menyangkut atas keberadaan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan beberapa hal dari yang terlibat pada modal sosial sebagai institusi sosial. Modal sosial akan dapat berkolaborasi secara sosial demi kepentingan bersama. Adanya sebuah ikatan atau jaringan sosial dalam masyarakat akan dapat membantu produktivitas dan membangun substansi dari modal sosial yang aktif terlibat dalam upaya pengembangan jaringan, nilai norma (Putnam,1993).

Penjelasan mengenai makna konsep modal dilihat kurang tepat, sehingga Uphoff (2000) kembali memaparkan bahwasannya di dalam modal sosial perlu adanya penekanan tertentu seperti unsur yang menjadi penyusunnya berikut dengan risiko dari interaksi tersebut. Kemudian, modal sosial diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari tipe sosial, budaya, psikologis, kognitif, kelembagaan, serta aset terkait guna meningkatkan kemanfaatan dari kegiatan kerjasama.

Sesuatu yang dapat menjadikan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien serta inovatif dalam penyebarannya merupakan manfaat yang mengalir atas kegunaan aset. Perilaku diartikan sebagai sebuah kegiatan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Uphoff (2000) menjelaskan hubungan antara modal sosial dan interaksi sosial harus dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak (*Mutually Beneficial Collective Action/MBCA*). Sehingga dapat

disimpulkan jika kelestarian sumber daya dapat dipengaruhi dari peran modal sosial dalam kegiatan pelaksanaan norma, sikap, kepercayaan masyarakat saat menjalin hubungan sosial dalam pemanfaatan sumberdaya (Kasirang, 2015).

2.1.1 Dimensi dan Karakteristik Modal Sosial

Menurut Nengsih (2016) modal sosial memiliki fokus terhadap jaringan sosial aksi individu dalam pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian modal sosial lebih menitik beratkan pada hubungan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang terjadi antar individu maupun kelompok yang saling bersinergi.

Selanjutnya tipologi di dalam modal sosial yaitu pola interaksi yang terbentuk berikut dengan risiko yang terikat (*bounding*) atau menjembatani (*bridging*). Sifat dari modal sosial yang telah terikat yaitu berorientasi ke dalam dan juga eksklusif serta jalinan kerjasama yang terhubung memiliki tingkat keterkaitan yang kuat namun belum tentu dapat menggambarkan kemampuan masyarakatnya. Pada modal sosial dengan dimensi menjembatani anggota kelompok lebih beragam dari berbagai latar belakang, sehingga ide yang dihasilkan bervariasi dengan tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan kebersamaan (Hasbullah, 2006).

Hubungan yang melibatkan individu dengan latar belakang status sosial yang berbeda seperti politikus dengan masyarakat awam disebut dengan tipe tipe *Linking*. Dalam pelaksanaannya lebih banyak bekerja pada hal internal dan menghasilkan hubungan sosial mikro

bersifat eksklusif dari segi persepsi, nilai, tradisi, dan adat istiadat yang disebut dengan *Social bounding* (perekat sosial). Hadirnya jembatan sosial karena meluasnya hubungan pada pihak eksternal. Kemudian terdapat istilah *Social linking* yang diartikan sebagai hubungan tanpa adanya perbedaan status sosial setiap individu dari beberapa kekuatan sosial. (Inayah, 2012).

2.1.2 Unsur Pembentuk Modal Sosial

Hubungan norma berkualitas dan memiliki kuantitas sebagai perekat sosial membentuk persatuan dan dapat diartikan sebagai modal sosial. Suharto (2007) dan Putnam (1993) memberikan pendapat yaitu terdapat tiga hal yang menjadi parameter modal yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*). Keterlibatan aktif upaya pengembangan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan sosial menjadi komponen penting. Sementara kepercayaan sebagai syarat keharusan terbentuknya modal sosial yang berperan sebagai hal-hal yang sangat penting pada modal usaha (Flassy dkk., 2009).

1. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan menjadi hal yang selalu melekat pada modal sosial dalam proses pembangunan yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga (Dharmawan, 2002):

- a. Kepercayaan yang diberikan kepada individu merupakan hal yang hadir pada setiap individu yang terbentuk dari seseorang yang mampu melakukan pemenuhan atas hal yang diharapkan orang lain sesuai dengan janji sebagai sebuah amanah (*promise keeping*)
- b. Kepercayaan yang diberikan kepada kelompok maupun kelembagaan dan

- termasuk bentuk regulasi untuk mengemban amanah pada lingkup kelompok.
- c. Kepercayaan yang diberikan bagi sistem abstrak seperti ideologi untuk membantu individu mengelola kepercayaan dalam bermasyarakat.

Koordinasi dan komunikasi pada modal sosial dapat memberikan pengaruh pada tindakan kolektif meraih keuntungan. Kepercayaan yang terpelihara dapat menghasilkan hubungan masyarakat yang berlangsung secara baik Nengsih (2016).

Kepercayaan dapat mendasari modal sosial yang dapat dimaknai sebagai aset sosial dan memfasilitasi adanya komunikasi serta koordinasi yang nantinya akan mempengaruhi tindakan dalam meraih keuntungan kolektif. Kepercayaan yang telah dibangun akan membentuk ikatan infrastruktur yang kokoh (Fukuyama, 2007).

2. Jaringan Sosial (*Social Networking*)

Pengorganisasian sosial disebut juga hubungan sosial yang terpolakan dan saling berkaitan membangun komunikasi antar individu (*interpersonal communication*) sebagai proses pertukaran informasi demi mencapai kesepakatan bersama (Hasbullah, 2006). Secara luas terdapat hubungan timbal balik di dalam masyarakat pada jaringan modal sosial yang telah diterapkan (Inayah, 2012)

Ukuran atas jaringan sosial yaitu ikatan informal atas hubungan personal antar individu yang saling menguntungkan seperti keluarga, pertemanan. Kemudian ikatan yang lebih umum lagi dan yang terakhir ikatan atas kepercayaan atas suatu kelembagaan yang berkuasa (Inayah, 2012).

Kekhususan jaringan sosial (*network characteristics*), kerapatan dan ketertutupan (*density and closure*), serta keragaman (*diversity*) menjadi ukuran

jaringan sosial pada modal sosial yang didalamnya terdapat interaksi. Eratnya hubungan dapat terlihat dari bagaimana sesama anggota saling memahami, sedangkan keragaman identik dengan keragaman yang dimiliki anggota seperti agama, suku, ras di wilayah tersebut (Nengsih, 2016).

3. Norma-Norma Sosial (*Social Norms*)

Dalam menjaga hubungan sosial yang diharapkan diperlukan norma yang hadir di dalam masyarakat seperti peraturan yang sengaja dibuat oleh masyarakat. Pada dasarnya hubungan timbal balik berasal dari modal sosial yang bervariasi dan saling berkolaborasi seperti nilai kejujuran, kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya yang merupakan peraturan tidak tertulis namun harus disepakati oleh masyarakat (Fukuyama, 2007).

Menurut Nengsih (2016) asosiasi sosial yang berisi norma, informasi antar anggota merupakan hal yang menyatakan akan pentingnya koordinasi dalam sistem sosial dan terwujudnya kemudahan bekerja sama untuk meraih keuntungan kolektif.

2.1.3 Wujud Nyata Modal Sosial

Kehadiran modal sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat, demokrasi dan pilar penting *good governance* membuat modal sosial sulit jika hanya dibayangkan. *Institute for Research an Empowerment* (Inayah, 2012) memberikan konsep terkait wujud nyata modal sosial:

1. Komunikasi bersama antar individu yang diperlukan bagi individu lain dan memiliki nilai yang positif sebagai bentuk interaksi hidup berdampingan.
2. Eratnya adat dan kebudayaan dalam masyarakat.

3. Kewajiban setiap individu untuk dapat selalu toleransi dan menghargai saat hidup bermasyarakat dan dijadikan sebagai prinsip demokrasi
4. Mendengar dan menghormati pendapat orang lain
5. Sikap jujur tentunya harus sudah tertanam pada setiap individu supaya dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih baik dan demokratis serta mampu melemahkan fikiran terkait korupsi dan manipulasi.
6. Pengembangan pengetahuan atas kearifan serta pengetahuan lokal dapat mendukung potensi dalam diri masyarakat.
7. Terbentuknya jaringan dan kepemimpinan sosial didasarkan pada keseluruhan kepentingan secara kesamaan visi, prinsip, serta hubungan personal masyarakat.
8. Sikap percaya dan memiliki bersama sebagai hubungan sosial yang harus terus dibangun.
9. Kebersamaan dan kesetiaan dari sebuah komunitas.
10. Sifat empati merupakan contoh tanggung jawab sosial di masyarakat mengarah ke kemajuan.
11. Kesadaran diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam semua hal di lingkungan sekitar.
12. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan merupakan sikap kebersamaan dan empati yang harus dimiliki.

2.1.4 Peran dan Fungsi Modal Sosial

Keberadaan modal sosial menjadi strategi dalam perkembangan pengelolaan hutan yang maksimal saat individu sudah mengetahui akan fungsi dan perannya. Menurut Hasbullah (2006), terdapat fungsi dan peran modal sosial:

- a. Membangun kekompakan di lingkungan masyarakat secara sukarela
- b. Membangun partisipasi antar masyarakat.
- c. Sebagai penyeimbang di dalam masyarakat.
- d. Terbentuknya pilar demokrasi.
- e. Supaya masyarakat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dengan pemerintah.
- f. Terwujudnya swasembada dan swadaya ekonomi.
- g. Merupakan bagian dari mekanisme manajemen konflik.
- h. Mampu mengatasi masalah di lingkungan masyarakat
- i. Pada masyarakat yang rawan konflik membantu memelihara integrasi sosial.
- j. Menciptakan serta memberikan fasilitas atas proses rekonsiliasi dalam masyarakat setelah terjadi konflik dan juga sebagai tindakan pemulihan.
- k. Tindakan pencegahan jika terjadi peristiwa disintegrasi sosial akibat konflik sosial dan dapat menjadi konflik kekerasan.
- l. Mampu menciptakan kepercayaan dari hubungan antar individu atau kelompok.
- m. Sebagai *Engagement* perekat sosial pencegah konflik kekerasan.

2.2 Hutan Rakyat

Penurunan kawasan hutan di negara Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang memenuhi kebutuhan dengan merambah ke kawasan hutan. Pembangunan hutan rakyat menjadi solusi pemecahan atas tekanan sumber daya hutan yang terjadi di Indonesia (Alviya dkk., 2017).

Hutan rakyat diartikan sebagai hutan di atas tanah dan dibebani oleh hak milik yang ditanami tanaman pangan juga tumbuhan berkayu, umumnya pengelolaan dilakukan sederhana oleh masyarakat Departemen Kehutanan (1999). Pengorganisasian atas pengelolaan hutan rakyat harus dilakukan secara tepat supaya kelestarian hutan tetap terjaga. Pengorganisasian juga berperan penting

guna pengambilan keputusan atas rencana pengelolaan hutan rakyat. semestinya pemerintah daerah memiliki peran atas pemberian penyuluhan serta monitoring masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat yang baik (Sudiana dkk., 2009).

Hutan rakyat mampu memberikan pemenuhan masyarakat seperti tanaman berkayu, peningkatan produktivitas lahan sekaligus meningkatkan perekonomian sehingga mampu menjadi solusi bagi tekanan yang dihadapi pada hutan di Indonesia (Abdian dkk., 2015). Monokultur, polikultur, dan juga agroforestri merupakan contoh pengembangan pengelolaan pada hutan rakyat yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam taraf lokal maupun nasional (Daud dan Fatmawati, 2019).

2.3 Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat dibedakan kedalam beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Aspek Sosial

Petani sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan rakyat juga dalam mekanismenya turut dibantu oleh lembaga terkait pengelolaan hutan. Terciptanya lapangan pekerjaan dapat terlihat dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Hal tersebut disebabkan ketika pengelolaan atas hutan rakyat meningkat otomatis industri pengelolaannya juga turut mengalami peningkatan sehingga membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja yang mampu diserap dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat biasanya masyarakat yang ada di desa. Contoh nyata yaitu adanya pembudidayaan tanaman kemiri sangat mendorong kegiatan agribisnis dan agroindustri dan menciptakan lapangan pekerjaan (Asmanah dan Sukaesi, 2008).

2.3.2 Aspek Ekonomi

Pengembangan hutan rakyat yang dilakukan petani memberikan efek positif berupa naiknya perekonomian. Pelaksanaan pola *agroforestry* membuat petani merasakan manfaat atas pendapatan dari hasil pertanian dan pemeliharaan tanaman kayu. Lainnya halnya dengan sistem pengelolaan dengan teknik *agroforestry*, sistem monokultur terlihat hanya dapat memberikan petani penghasilan dalam kurun waktu yang panjang dan memberikan pemenuhan atas kebutuhan yang mendesak. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari pengelolaan hutan rakyat dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah warga setempat. Kegiatan penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dinilai mampu meningkatkan kondisi perekonomian bagi masyarakat setempat (Reksohadiprojo, 2014).

2.3.3 Aspek Ekologi

Kualitas lahan dapat dipengaruhi oleh penggunaan lahan seperti kegiatan model *agroforestry* pada hutan rakyat. Efek yang diberikan dari kegiatan *agroforestry* cukup signifikan, kegiatan ini mampu mempengaruhi tanaman pohon, kesuburan tanah, hingga menahan erosi. Kemudian menciptakan iklim mikro, memperbaiki tingkat kesuburan tanah, memperbaiki karakteristik hidrologi. Kegiatan ini juga mempengaruhi atas flora dan fauna, sehingga terbukti model *agroforestry* mampu membantu masyarakat dalam melestarikan hutan. Biasanya pada lahan kering masyarakat menanam tanaman kayu dan buah-buahan sehingga menjadikan lahan kurang produktif dan subur. Diharapkan dengan adanya hutan rakyat mampu mengembalikan kesuburan lahan yang telah kritis dan kembali memberikan manfaat untuk masyarakat (Awang, 2015).

2.4 Aktivitas Pengelolaan Hutan Rakyat

Hutan rakyat milik masyarakat dibangun secara swadaya untuk menghasilkan komoditas maupun tanaman kayu-kayu an sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan. Hutan rakyat yang dibangun masyarakat mampu berdiri sendiri dan berswadaya murni baik dalam bentuk tanaman dengan satu jenis (hutan rakyat mini) maupun tanaman dengan pola campuran (agroforestri) (Awang, 2015).

Secara ekologis hutan bermanfaat sebagai perbaikan kualitas lingkungan atas tata kelola air Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi tanah. Memberikan peningkatan pendapatan para petani karena penyediaan kayu dan komoditas lain dari sisi ekonomi hutan rakyat (Indrawati, 2009).

Menurut Abdian dkk (2015), aktivitas pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat diawali tahap pemeliharaan, panen, sampai pemasaran. Sementara proses penanaman diawali terlebih dahulu dengan persediaan lahan, penyediaan bibit, baru melakukan penanaman. Proses penyiangan tanaman, pemupukan, pemangkasan cabang tanaman, penjarangan, serta pemberantasan hama penyakit merupakan bagian dari pemeliharaan. Setelah tanaman sudah dapat memberikan hasil maka pemilik sudah dapat melakukan proses panen. Terakhir, pemilik dapat melakukan pemasaran atas hasil panen sehingga memperoleh pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.